

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan konsep Grindle (1997) pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Barat, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pendidikan belum terlaksana secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya komitmen secara kelembagaan di dalam mendorong para aparatur sipil negara untuk menempuh pendidikan.
2. Pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para Aparatur Sipil Negara di lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dimana pelatihan hanya berupa dorongan secara individu tanpa adanya dukungan moril sepeserpun.
3. Kondisi kerja belum terlaksana secara optimal hal tersebut disebabkan oleh interaksi sosial yang tidak berjalan diakibatkan tidak adanya pola komunikasi yang terbangun antara pimpinan dan bawahan serta rekan kerja.
4. Rekrutmen belum optimal hal ini didukung tidak adanya kewenangan penentuan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat hanya sebatas

penyampaian kebutuhan aparatur pada bidang-bidang yang memiliki kekosongan sumber daya manusia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Perlu ada dukungan secara kelembagaan dengan dikeluarkannya sebuah regulasi yang jelas mengenai dorongan para aparatur sipil negara (ASN) untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan diberikannya pula beasiswa.
2. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para aparatur sipil negara pada biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat disertai adanya dukungan anggaran yang memadai.
3. Perlunya menciptakan kondisi kerja yang harmonis dimana staf dan pimpinan saling berkolaborasi didalam menangani kekurangan-kekurangan yang ada pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta perlunya ketersediaan anggaran yang cukup dalam setiap aktivitas di Biro Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat
4. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang efektif persoalan pengisian formasi yang kosong maupun kurang aparturnya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat disertai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan agar aparatur yang direkrut telah siap bekerja tanpa

adanya lagi pelatihan-pelatihan tambahan yang memerlukan lagi anggaran yang cukup besar.

C. Produk Tesis

Setelah melakukan penelitian terhadap Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti menghasilkan sebuah produk tesis berupa *Policy Brief* dengan Judul ” ***Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat***”. *Policy Brief* ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam perumusan kebijakan dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.